

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Latar Belakang Institusi



Gambar 2.1 Logo Instansi
Sumber : Website Instansi

DPRD bukanlah istilah yang digunakan pada tahun-tahun awal berdirinya Republik Indonesia. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa lembaga legislatif tidak pernah ada. Pada masa awal kemerdekaan, sebuah organisasi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat telah berdiri. Maka, persinggungan antara BPRD Jawa Barat dengan cikal bakal DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan.

Tahun 1955, *pasca* pemilu perdana dijalankan bertanggal 29 September 1955, sebutan "DPRD Provinsi Jawa Barat" secara resmi ditetapkan. Bertanggal 1 September 2014, berlokasi Gedung Merdeka, keanggotaannya DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

Pada Rapat Paripurna Istimewa bertanggal 1 September 2014 pada Gedung Merdeka, DPRD Provinsi Jawa Barat melantik anggotanya dalam masa jabatan 2009-2014. Periode 2014-2019, terdapat delapan fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat: Fraksi Gabungan Restorasi Nurani Rakyat, Fraksi Gabungan Golkar Amanah, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PPP.

DPRD didefinisikan dalam kelembagaan representatif masyarakat daerah juga berposisi guna berunsuran diselenggarakannya Pemda. DPRD Provinsi Jawa Barat termasuk kelembagaan mewakili bermasyarakat daerah pada Provinsi Jawa Barat.

DPRD Provinsi Jawa Barat tersusun atas satu orang ketua serta keempat orang wakil ketua. Saat ini DPRD Provinsi Jawa Barat diketuai dari Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, SH, MH yang berasal dari Partai Gerindra, menjabat sebagai ketua DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Tugas dan Wewenang DPRD

Dalam berperan representatif masyarakat DPRD memiliki peran pembentukan Perda, Anggaran serta Pengawasam, juga memiliki tugas dan tanggungjawab, antara lain :

1. Membentuk Perda bersama Gubernur
2. Mengkaji juga menyajikan kesetujuan Raperda terkait APBD dengan diusung Gubernur
3. Mengawasi dalam penerapan Perda juga APBD
4. Memberikan masukan diangkatnya serta/ataupun diberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden dari Menteri Dalam Negeri guna keabsahan diangkat ataupun diberhentikan.
5. Memilih Wakil Gubernur terkait situasi kosongnya posisi Wakil Gubernur
6. Menyajikan saran juga masukan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam perencanaan perjanjian tingkat internasional pada daerah.
7. Menyajikan kesetujuan perihal perencanaan bekerja sama global dengan dijalankan dari Pemprov.
8. Memintakan pelaporan keterangan bertanggungjawab Gubernur terkait menyelenggarakan pemerintahan daerah
9. Menyajikan kesetujuan dalam perencanaan berkerjasama diantara daerah lainnya ataupun bersama pihak ketiga dengan membebaskan masyarakat
10. Mengoptimalkan berjalannya kewajiban daerah selaras akan hukum positif
11. Menjalankan penugasan juga tanggungjawab mengacu hukum positif

Keseluruhan anggota DPRD memiliki hak-hak istimewa sebagai berikut: hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, membela diri,

memberikan suara, mengikuti orientasi dan pengembangan tugas, imunitas, protokoler, hak keuangan dan administratif, serta ruang kerja. Interpelasi, pertanyaan, dan pandangan dapat diajukan oleh DPRD.

2.1.2 Visi Dan Misi

Visi :

Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi

Misi :

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan public yang inovatif
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang Sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan pusat inovasi serta pelaku Pembangunan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2.1.3 Fraksi Yang Terdaftar di DPRD Provinsi Jawa Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki anggota Fraksi. Pembentukan Fraksi di DPRD bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi para anggotanya. Fraksi juga bertugas guna menelaah kinerjanya anggota, lalu temuan evaluasi yang diperoleh oleh fraksi akan ditunjukkan kepada publik.



Gambar 2.2 Fraksi terdapat pada DPRD Provinsi Jawa Barat

Sumber : Website Instansi

Gambar diatas merupakan berbagai fraksi dengan terdapat pada DPRD Provinsi Jawa Barat, dimana tempat Mahasiswa melakukan Kerja Profesi, berikut latar belakang mengenai Fraksi yang disebutkan :

1. Fraksi Gerindra Persatuan

Bertanggal 6 Februari 2008, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara resmi didirikan. Kemiskinan yang mendorong terbentuknya Partai Gerindra adalah hasil dari kesembronoan dan

pengabaian terhadap kesejahteraan orang lain. Maka, bertanggal 6 Februari 2008, secara keresmian dilembagakan dengan tujuan guna memajukan kesejahteraan umum dan kepentingan umum. Antara tahun 2008 dan 2019, Gerindra mengambil sikap sebagai partai oposisi. Gerindra menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019. Ir. H. Joko Widodo, presiden Republik Indonesia saat itu, memilih dan menunjuk Letnan Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan untuk masa bakti 2019-2024.

2. Fraksi PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), didirikan di Indonesia bertanggal 20 April 2002, ialah termasuk organisasi berpolitik yang berasaskan Islam, serta cabang Partai Keadilan (PK), sebuah organisasi dibentuk bertanggal 20 Juli 1998 di Jakarta. PKS, yang muncul dari kelas menengah perkotaan antara tahun 1998 dan 2005, merupakan organisasi fundamentalis yang berbeda dengan berkelompok Islam modernis lain, termasuk Muhammadiyah, Persis, serta lainnya. PKS, termasuk organisasi politik dengan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di Indonesia, mempertahankan ketaatannya pada prinsip-prinsip Islam fundamentalis sambil menunjukkan tingkat moderasi dalam beberapa isu.

3. Fraksi PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi pondasi bagi PDIP. Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dengan dipelopori Presiden Sukarno bertanggal 4 Juli 1927, adalah partai konstituen dari kumpulan PDI.

4. Fraksi Golkar

Pada tahun 1964, di akhir pemerintahan Presiden Soekarno, Sekretariat Bersama Golkar didirikan, yang menandai awal sejarah Partai Golkar. Golkar dibentuk bersama militer, terkhusus perwira Angkatan Darat, yakni Letnan Kolonel Suhardiman dalam SOKSI, mendirikan Sekretariat Bersama Golkar, yang menjadi pusat bagi puluhan organisasi yang mewakili mahasiswa, perempuan, akademisi, buruh, petani, dan nelayan.

5. Fraksi PKB

Pembentukan era Reformasi terjadi setelah undur dalam Presiden Soeharto bertanggal 21 Mei 1998. Sebuah organisasi politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), muncul pada awal era modern Indonesia. Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, Mustofa Bisri, serta A Muhith Muzadi, di antara para ulama yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), mendirikan PKB pada tanggal 23 Juli 1998. Pada saat ini, Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal dengan nama Cak Imin, menduduki posisi Ketua Umum PKB.

6. Fraksi Demokrat

Parpol berbasis di Indonesia. Berdiri tanggal 9 September 2001, partai ini memperoleh pengakuan hukum pada tanggal 27 Agustus 2003. Pembentukan Parpol tersebut berkorelasi dalam tujuan guna mengangkat Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada masa Presiden Megawati, menjadikan presiden.

7. Fraksi PAN

Keanggotaan partai politik Indonesia. Prinsip-prinsip partai didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan menganjurkan kebajikan bagi seluruh alam, merupakan prinsip PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998, dengan nomor akta pendirian M-20.UM.06.08 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) dengan diberikan tanggal 27 Agustus 2003. Kini Ketua Umum nya ialah Zulkifli Hasan. Soetrisno Bachir menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai, sedangkan Hatta Rajasa Tatong Bara Yasti Seoprejo Mokoagow mengetuai Majelis Pertimbangan Partai.

8. Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia

Partai politik yang secara resmi didirikan di Jakarta bertanggal 1 Februari 2011 melalui berakta notaris, Partai NasDem secara resmi diakui oleh Kemenkuham bertanggal 27 Juli 2011, setelah mendeklarkan bertanggal 26 Juli 2011. Kemenkuham secara resmi mengakui Partai NasDem dengan berbadan hukum bertanggal 11 November 2011, yang juga sekaligus hari jadinya partai.

2.1.4 Struktur Organisasi DPRD Provinsi Jawa Barat

DPRD Provinsi Jawa Barat tidak hanya terdapat satu struktur organisasi tetapi terdapat beberapa Struktur Organisasi dari masing-masing divisi yang dimana mempunyai tugas berbeda-beda, antara lain :

2.1.4.1. Strukur Organisasi Pejabat Struktural (Pimpinan DPRD)



Gambar 2.3 Pejabat Struktural

Sumber : Website Instansi

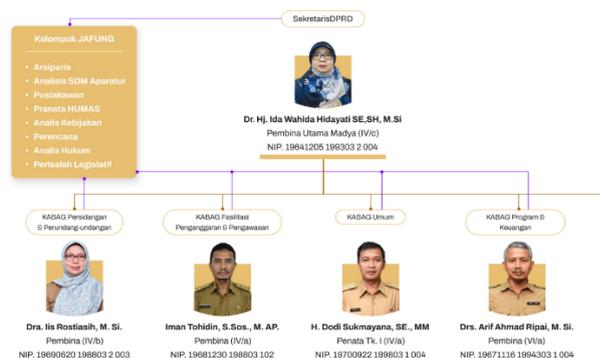
Pimpinan DPRD tentu saja mempunyai tugas dan wewenang.

Berikut adalah tugas dan wewenang Pimpinan DPRD :

1. Memimpin rapat yang dilaksanakan DPRD juga berkesimpulan temuan persidangan guna disusun menjadi suatu Keputusan.
2. Penyusunan perencanaan kerja pimpinan juga menentukan pembagian pekerjaan diantara ketua dan wakil.
3. Memutuskan dibagikannya penugasan diantara ketua serta wakil.
4. Menjalankan pengkordinasian terkait sarana menyatukan pengimplimentasikan keagendaan juga aktifitas dalam sarana kelengkapan DPRD.
5. Sebagai penjuror bicara DPRD.
6. Menjalankan juga mengsosialisasikan Keputusan DPRD.

7. Mewakilkan DPRD perihal keterkaitannya pada Kelembagaan atau instansi lain.
8. Pembentukan berkonsultasi akan Kepala Daerah juga Pimpinan Kelembagaan lain selaras akan Keputusan DPRD.
9. Representatif DPRD di pengadilan.
10. Menjalankan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh DPRD saat memutuskan hukuman atau rehabilitasi anggota.
11. Menyusunkan perencanaan penganggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD dengan dilakukan pada rapat paripurna juga
12. Penyampaian pelaporan berkninerja pimpinan DPRD perihal rapat paripurna DPRD dengan wajib dijalankan.

2.1.4.2. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat



Gambar 2.4 Struktur Organisasi DPRD Provinsi Jawa Barat

Sumber : Website Instansi

Struktur organisasi terdiri dari unit kerja dan keterkaitan di antara bagian-bagian penyusunnya dalam posisi untuk menetapkan kegiatan operasional dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Secara formal mengkoordinasikan (integrasi) dan membagi fungsi atau kegiatan, pekerjaan diilustrasikan oleh struktur organisasi.

DPRD terdiri dari beberapa divisi kerja, salah satunya adalah sekretariat. Fungsi utama Sekretariat DPRD adalah mendukung dan menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi, selain mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga perahlian dengan

dibutuhkan dari DPRD selaras akan kompetensi finansial kedaerahan, Terkait menjalankan penugasan berpokok itu, Sekretariat DPRD memiliki peran antara lain :

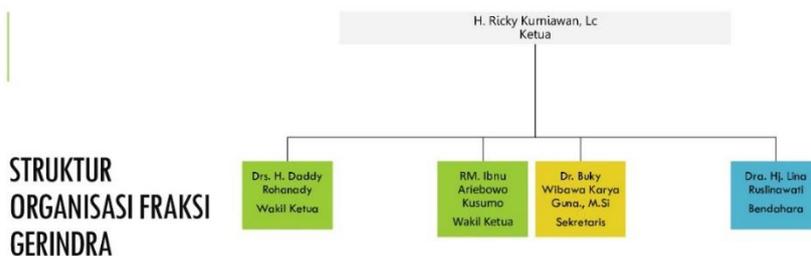
1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan daerah.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan daerah.
3. Menyelenggarakan berbagai perapatan.
4. Menyelenggarakan juga menyediakan pengkoordinasian ketenaga ahli dengan dibutuhkan DPRD.

Terdapat pula tugas dan bagian dari masing-masing divisi pada Sekretariat DPRD :

1. Pembina Utama Madya. Mempunyai tugas, diantaranya :
 - Menganalisis SDM Aparatur.
 - Melakukan perencanaan.
 - menganalisis hukum.
 - Menganalisis kebijakan.
2. KABAG Persidangan dan Perundang-undangan. Mempunyai tugas, diantaranya :
 - Menjalankan pengkajian perundang-undangan.
 - Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan, menjalankan hubungan masyarakat, menjalankan publikasi serta memverifikasi.
 - Mengoordinasikan serta mengevaluasi risalah rapat.
 - Melaksanakan penugasan kedinasan lainnya dengan diamanatkan Sekretaris DPRD selaras akan tanggungjawab.
3. KABAG Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan. Mempunyai tugas, diantaranya :
 - Memfasilitasi juga berkordinasi pembahasan pelaporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.
 - Menjadi sarana juga pengkordinasian pendukung mengawasi penerapan anggaran.
 - Memfasilitasi juga menggordinasikan mengawasi dilaksanakannya peraturan.

- Mengkoordinasikan juga mengendalikan pengimplementasian aktifitas sarana guna Anggaran juga Pengawasan DPRD juga menyerap masukan sekitar.
4. KABAG Umum. Mempunyai tugas, diantaranya :
- Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD.
 - Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD.
 - Melaksanakan kearsipan, menjalankan pengadaan juga pemeliharaan fasilitas juga keterkaitan Sekretariat DPRD.
 - Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD.
5. KABAG Program dan Keuangan. Mempunyai tugas, diantaranya :
- bertugas menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD.
 - Menjalankan kelolah finansial Pimpinan, Anggota, serta Sekretariat DPRD.
 - Memeriksa pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan finansial Sekretariat DPRD.
 - Menjalankan administrasi pembayaran penggajian DPRD serta penggajian pegawai Sekretariat DPRD.
 -

2.1.4.3. Struktur Organisasi Pada Fraksi Gerindra



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Fraksi Gerindra

Sumber : Website Instansi

Gambar diatas menunjukkan struktur organisasi pada Fraksi Gerindra Di DPRD Provinsi Jawa Barat, masing-masing mempunyai tugas yaitu :

1. Ketua

Di dalam organisasi pasti membutuhkan seorang ketua, tanpa adanya ketua para anggota organisasi akan kesulitan untuk melakukan tugas nya. Tugas dari seorang ketua adalah memimpin serta mengkoordinasi para anggota nya. Selain itu, tugas ketua adalah membuat kebijakan dan melaksanakan program kerja bersama para anggota.

2. Wakil Ketua

Ketua tentu saja membutuhkan wakil ketua untuk membantu dalam melaksanakan program kerja. Wakil ketua juga mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris

Tanggung jawab Sekretaris ialah mengelolah proses pembuatan juga pelaksanaan visi, tujuan, strategi, rencana kerja tahunan, dan evaluasi hasil, Mengkoordinasikan, mendiskusikan, dan menyinkronkan pelaksanaan tugas.

4. Bendahara

Tugas dari bendahara adalah Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan dan Melaksanakan penatusahaan dan pertanggungjawaban keuangan.